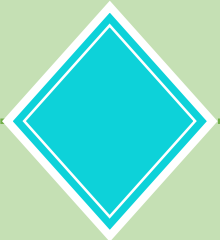


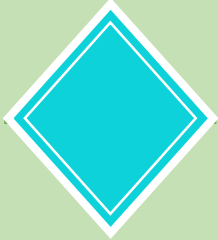
ROAD MAP PELAYANAN PUBLIK DI KEMENDAGRI

2014-2015



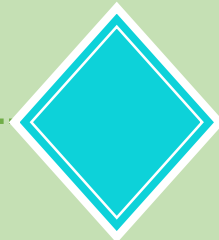
1. Pembentukan Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri secara *Ex Officio* (13 Layanan Administrasi dan Konsultasi :
 - a) Pelayanan 1 (satu) Pintu Registrasi Konsultasi dan Administrasi
 - b) Visum SPPD 1 (satu) Pintu
2. Dibentuk Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi sesuai Permendagri No.43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

2016-2018



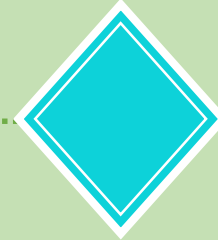
1. Memenuhi Standar Pelayanan Sesuai UU 25 /2009 Ttg Pelayanan Publik;
2. Mendapatkan Penilaian Green Area dengan Nilai 101 dari Ombudsman RI;
3. Perubahan Tusi Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi Sesuai Permendagri 8 Tahun 2018 Ttg Perubahan Kedua Atas Permendagri 43 Tahun 2015 Ttg Struktur dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemda); dan
4. Launching 14 Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi Berbasis *Online* (SIOLA).

2019



1. Penambahan 11 layanan administrasi pada aplikasi SIOLA;
2. Penetapan Zona Integritas di Unit Layanan Administrasi, Serta Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 tentang Pelayanan Administrasi Dan Konsultasi Berbasis *Online*;
3. Piagam penghargaan penyelesaian pelayanan publik tahun 2019 mendapat nilai "sangat baik" (A-); 4,06; dan
4. Telah dilakukan perjanjian Kerjasama antara BSSN dengan Kemendagri terkait pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik dilingkungan Kemendagri.

2020-2024



1. Penerapan SNI ISO 37001:2016 ttg Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
2. Di tahun 2020-2024 secara bertahap seluruh layanan administrasi kemendagri berbasis *online* dan menggunakan *digital signature*;
3. Pengintegrasian aplikasi layanan administrasi *online* dengan K/L terkait (setneg: rekomendasi PDLN bagi ASN Pemda, rekomendasi PDLN bagi KDH/Wakil KDH, dan DPRD Provinsi, Kab/Kota; Kemenristek dan Dikti: Pen-erbitan Surat Pemberitahuan Peneliti Asing);
4. Secara bertahap pengintegrasian seluruh layanan administrasi dan konsultasi dilingkungan Kemendagri dan UPT pada SIOLA;
5. Secara bertahap pengintegrasian seluruh layanan administrasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi;
6. Pengembangan dan Evaluasi aplikasi SIOLA; dan
7. Pada Tahun 2020 diharapkan target peredikat WBK dan WBBM dapat tercapai.

